

Kontribusi *Non-Government Organization* (NGO) dalam Pendidikan Anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Sabah

Shylvia Windary¹

TransBorders*

Abstract

This study analyzes the contribution of Non-Government Organizations (NGOs) in the education of Indonesian migrant workers in Sabah, regarding the ease of educational services for Indonesian children in Sabah, where they are very difficult to access education and various supporting facilities, both physically and mentally, formal or informal. In writing this thesis, the author uses the interview method and literature study. The limited education of the children of Indonesian Migrant Workers in Sabah has become an opportunity to achieve an interest for certain organizations, both national and international. There are several private educational institutions that provide educational services for the children of Indonesian migrant workers in Sabah, including the Borneo Child Aid Society, the Indonesian Children's Education Care Foundation (YPPAI) and the Mutiara Serat Bangsa Empowerment Foundation (YPMSB).

Keywords: *Indonesian Migrant Worker (TKI); Education of TKI Children; Non-Government Organization (NGO)*

Abstrak

Penelitian ini menganalisa tentang kontribusi *Non-Government Organization* (NGO) dalam pendidikan anak-anak TKI di Sabah, menyangkut atas kemudahan pelayanan pendidikan bagi anak-anak Indonesia yang berada di Sabah, di mana mereka sangat sulit mendapat akses pendidikan dan berbagai kemudahan penunjang baik itu secara formal maupun informal. Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan. Keterbatasan pendidikan anak-anak TKI di Sabah, menjadi peluang dalam mencapai suatu kepentingan bagi organisasi-organisasi tertentu baik nasional maupun internasional. Ada beberapa lembaga pendidikan swasta yang ikut memberikan pelayan pendidikan untuk anak-anak TKI di Sabah diantaranya *Borneo Child Aid Society*, Yayasan Peduli Pendidikan Anak Indonesia (YPPAI) dan Yayasan Pemberdaya Mutiara Serat Bangsa (YPMSB).

Kata kunci: *Tenaga Kerja Indonesia (TKI); Pendidikan Anak TKI; Non-Government Organization (NGO)*

Pendahuluan

Hubungan Indonesia dan Malaysia mempunyai cakupan yang sangat luas, semuanya berkaitan dengan kepentingan nasional masyarakat masing-masing. Indonesia dan Malaysia mempunyai hubungan sejarah, budaya, dan kekerabatan

yang sangat erat. Sekalipun demikian, hubungan kedua negara bertetangga ini seringkali mengalami pasang surut dan berhadapan dengan berbagai macam tantangan. Termasuk ke dalam tantangan ini adalah bagaimana meningkatkan kerja sama kedua negara sebagai langkah strategis yang harus dibina melalui berbagai cara.

¹ Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan
Email: shylvia.windary@unpas.ac.id

* Jurnal Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan
Email: transborders.journal@unpas.ac.id

Dalam penelitian ini penulis akan berfokus pada peran lembaga non pemerintah dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan anak-anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berada di Sabah. Penulis menganggap topik ini penting untuk diteliti berkaitan dengan kemudahan pelayanan pendidikan bagi anak-anak Indonesia yang berada di Sabah, di mana mereka sangat sulit mendapat akses pendidikan dan berbagai kemudahan penunjang baik itu secara formal maupun informal.

Berbagai faktor yang mendorong tingginya minat para TKI untuk bekerja di Malaysia ternyata membawa pengaruh negatif terhadap perkembangan pendidikan anak mereka. Sabah merupakan daerah tujuan utama para TKI, khususnya yang berasal dari Indonesia bagian timur untuk mencari penghidupan. Berdasarkan data Konsulat Republik Indonesia di Tawau, sekitar 21.627 anak TKI di Sabah belum memperoleh fasilitas pendidikan; hanya sekitar 8.000 anak yang dapat menikmati pendidikan secara nonformal.² Jumlah ini belum termasuk anak dari TKI ilegal. Minimnya sarana pendidikan serta tuntutan perekonomian memaksa anak-anak TKI untuk bekerja membantu orang tua demi memenuhi kebutuhan keluarga.

Untuk mengatasi hal tersebut, sebenarnya ada peluang bagi anak-anak TKI untuk bersekolah di sekolah Malaysia. Pada prinsipnya, pemerintah Malaysia dapat menerima pelajar asing yang akan belajar di sekolah-sekolah Malaysia, baik sekolah kebangsaan (sekolah negeri) maupun sekolah swasta, sepanjang calon siswa dapat memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan. Beberapa persoalan yang kadang-kadang sulit dipenuhi oleh pelajar warga negara Indonesia untuk mendapatkan pelayanan pendidikan antara lain dokumen pribadi anak, status

keimigrasian orang tua, tempat tinggal dan ketersediaan tempat. Sebelum tahun 2002, misalnya, para TKI masih bebas bekerja dan menyekolahkan anak mereka di sekolah Malaysia tanpa dokumen. Tetapi, setelah pemerintah Malaysia mengeluarkan Akta Perburuhan Tahun 2001 dan Akta Pendidikan Tahun 2001, kegiatan mereka dibatasi. Semua pekerja dan pelajar asing harus memiliki dokumen lengkap.³

Pada umumnya, anak-anak warganegara Indonesia yang tinggal di ladang-ladang perkebunan kelapa sawit, perkebunan teh, dan pabrik-pabrik tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah seperti paspor, visa masuk, dan ijin tinggal. Status keimigrasian orang tua mereka kebanyakan *unskilled workers*. Tempat tinggal mereka berubah-ubah dan tidak mempunyai alamat yang tetap. Di samping itu, tempat tinggal mereka berjarak jauh dari sekolah. Jarak tempuh dari tempat tinggal ke sekolah umumnya memerlukan waktu dua atau tiga jam. Transportasi umum sangat jarang, dan sekalipun ada mereka tidak mampu membayar biaya transpor. Ketersediaan sekolah juga menjadi persoalan bagi pelajar warga negara Indonesia. Selain itu, sikap para orang tua yang kurang menyadari arti penting dan manfaat pendidikan bagi anak-anaknya juga sering menjadi kendala.

Persoalan-persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh para siswa dan orang tua mereka. Inilah yang menyebabkan anak-anak warganegara Indonesia yang menjadi TKI di Sabah tidak memperoleh pelayanan pendidikan yang memadai. Buruknya kualitas dan sarana pendidikan di kalangan TKI merupakan resiko yang harus ditanggung pemerintah Indonesia. Sehubungan dengan itu, keberadaan NGO sangatlah penting sebagai sarana penyedia layanan pendidikan anak TKI di Sabah.

² Data mencakup wilayah kerja Konsulat Republik Indonesia Tawau, 13 November 2012.

³ D. Bachtiar, *Mengurangi Kebuntuan Penanganan PRT Migran Indonesia di Malaysia*,

Dialog Inter-stakeholders Kerja sama Migran CARE and ILO, 17 Desember 2009, p. 3.

Metode Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan. Untuk yang pertama, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Hubungan Luar Negeri di

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang bertanggung jawab dalam keberadaan TKI di Sabah; kepala salah satu NGO nasional yang ikut terlibat dalam pemberian pelayanan pendidikan anak TKI di Sabah; dan kepala perusahaan sebuah perkebunan tempat TKI bekerja guna mendapatkan data menyangkut sarana dan prasarana yang disediakan oleh perusahaan dalam mendukung pendidikan anak-anak TKI. Sementara itu, buku-buku, artikel jurnal, surat kabar, dan informasi dari Internet juga akan digunakan sebagai sumber analisis kasus yang diteliti.

Kerangka Teori

Untuk mengkaji kontribusi lembaga non pemerintah dalam pendidikan anak-anak TKI, diperlukan seperangkat konsep dan teori yang tepat sebagai alat analisis. Di sini penulis akan menggunakan konsep *Organisasi Internasional* dan *kerja sama internasional*.

Organisasi Internasional

Organisasi internasional merupakan suatu istilah dalam hubungan internasional yang menunjukkan tentang adanya kerjasama pada beberapa negara yang dibentuk melalui suatu gerakan organisasi, yang mana tujuannya bisa bersifat umum maupun khusus. Organisasi internasional menurut A. Le Roy Bennet yang ditulis dalam bukunya *International Organization, Principle and Issues* menjelaskan bahwa organisasi internasional sebagai sarana kerjasama negara-negara, yang dapat mendatangkan manfaat untuk anggota-

anggota yang bergabung di dalamnya.⁴ Sebuah organisasi internasional juga dituntut untuk dapat menjadi fasilitator sebagai saluran komunikasi dengan pemerintah, karena apabila terjadi masalah dapat dengan mudah dicari pemecahan masalahnya. Definisi lainnya mengenai Organisasi Internasional, yaitu menurut Cheever dan Haviland yang mendefinisikan organisasi internasional secara sederhana yaitu:⁵

“Any cooperative arrangement instituted among state, usually by a basic agreement, to perform some mutually advantageous functions implemented through periodic meetings and staff activities”.

Artinya organisasi internasional digambarkan sebagai sebuah pengaturan dalam bentuk kerjasama internasional yang melembaga antar negara-negara, berdasarkan sebuah persetujuan dasar yang umum, dan disepakati untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang saling menguntungkan melalui sebuah pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staff yang dilakukan secara berkala. Adapun syarat suatu organisasi dapat dikatakan sebagai suatu organisasi internasional yaitu harus memiliki organ permanen, yang mana obyeknya tidak mencari keuntungan melainkan untuk kepentingan bagi semua pihak atau negara, dan anggota yang tergabung dalam organisasi bebas bagi setiap individu atau kelompok dari tiap negara. Sebuah organisasi internasional setidaknya juga harus mempunyai karakteristik seperti sebuah kerjasama antar lintas batas negara, yang mana kerjasama tersebut juga memiliki tujuan yang telah disepakati bersama, baik antar pemerintah atau pun non-pemerintah, selain itu struktur organisasi maupun pelaksanaannya harus jelas dan lengkap sesuai dengan fungsinya masing-masing Organisasi internasional

⁴ Bennet, Leroy. 1995. *International Organization, Principle and Issue*. Eaglewood, New Jersey: Prentice Hall Inc.

⁵ Cheever S. Daniel, & Jr Haviland, H. Field. 1967. *Organizing For Peace: International Organization In World Affair*. New York: Houghton Mifflin.

dapat dibedakan menjadi 2 menurut jenisnya oleh Umar S. Bakry yaitu:⁶

1. Organisasi antar pemerintah atau Intergovernment Organizations (IGO) Merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh dua atau lebih negara. Bergabung menjadi anggota IGO biasanya berbentuk sukarela, maka dari itu negara-negara yang tergabung di dalamnya akan merasa aman karena keadulatan dari masing-masing negara tidak terancam.
2. Organisasi non-pemerintah atau Non-Government Organizations (NGO), merupakan organisasi yang lebih terstruktur bila di dibandingkan dengan IGO, selain itu NGO dijalankan secara internasional sehingga hubungan yang erat dengan pemerintah tidaklah ada

Dari penjelasan tersebut, NGO merupakan aktor mandiri tanpa ada campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pelayanan pendidikan anak TKI di Sabah menjadi fokus permasalahan yang di selesaikan oleh NGO. Pelayanan pendidikan tersebut diberikan dari beberapa NGO yaitu, *Humana Child Aid Society*, Yayasan Peduli Pendidikan Anak Indonesia (YPPAI), Yayasan Pemberdaya Mutiara Serat Bangsa.

Dari tiga lembaga ini, salah satunya berada di bawah koordinasi *Borneo Child Aid Society* yang didirikan pada tahun 1991 dengan sponsor salah satu LSM Eropa dan selanjutnya dikelola oleh Humana Holland sampai tahun 1998. LSM ini akhirnya diambil alih oleh perusahaan Malaysia Hap Seng Consolidate's melalui Yayasan Luak Gek Poh.⁷ Sedangkan sisanya lembaga swasta nasional yang peduli terhadap pendidikan anak-anak TKI di daerah perbatasan termasuk di Sabah. Kedua lembaga ini bernama Yayasan Peduli Pendidikan Anak Indonesia (YPPAI) dan Yayasan Pemberdaya Mutiara Serat Bangsa

(YPMSB) yang sama-sama berpusat di Indonesia.

Pembahasan

Latar Belakang Keberadaan TKI di Sabah

Sabah merupakan negara bagian Malaysia yang memiliki jumlah buruh migran terbesar di kawasan timur ASEAN. Letak geografis dan daya tarik ekonomi yang kuat menjadikan Sabah sebagai tujuan migrasi bagi para pekerja migran. Sabah terhubung dengan daerah-daerah sekitarnya, antara lain dengan Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Maluku dan kepulauan Filipina bagian selatan, terutama melalui aktivitas ekonomi. Setelah kemerdekaan Malaysia pada tanggal 31 Agustus 1957, batas negara dan status kewarganegaraan menjadi permasalahan bagi penduduk yang keluar-masuk daerah Sabah. Dengan adanya peraturan keimigrasian, dapat dibedakan antara pekerja legal dan ilegal, antara yang berdokumen maupun yang tidak memiliki dokumen keimigrasian.

Pada awal abad ke-20, tepatnya tahun 1907, Inggris mulai melakukan rekrutmen pekerja dari Jawa dan Cina untuk bekerja di Sabah. Pada tahun 1907-1931 di Sabah terdapat sekitar 10.000 pekerja yang berasal dari Jawa. Sedangkan masa pendudukan Jepang tahun 1941-1945 buruh Jawa masih tetap direkrut untuk dipekerjakan di perkebunan. Secara keseluruhan orang Indonesia yang bekerja di Sabah meningkat dari 1.910 orang pada tahun 1951 menjadi 7.473 orang pada tahun 1960, dan meningkat lagi secara dratis pada tahun 1970 sebanyak 20.080 orang.⁸

Periode 1941-1945 berdampak besar bagi migrasi tenaga kerja ke Sabah, di mana perekrutan pekerja dilakukan dengan

⁶ Bakry, Umar Suryadi, Metode Penelitian Hubungan Internasional, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016

⁷ Borneo Child Aid Society, *Education for Plantation Children*, Lahad Datu, 2009.

⁸ R. Tirtusudarmo, *Mencari Indonesia: Demografi Politik Pasca Soeharto*, LIPI Press dan Yayasan Obor, Jakarta, 2007, p. 123.

sistim kerja paksa. Periode ini dapat dikatakan sebagai tahun-tahun peperangan. Namun pada tahun 1950, Sabah kembali menjadi tujuan pekerja migran. Pekerja migran ini masuk melalui jalur-jalur seperti pelabuhan Tawau bagi pekerja Indonesia dan pelabuhan Sandakan, Semporna dan Lahad Datu bagi tenaga kerja yang berasal dari Filipina.⁹ Berdasarkan hasil sensus 1991, hampir sepertiga dari penduduk Sabah adalah keturunan Indonesia.¹⁰ Para pekerja Indonesia ini berangsur-angsur memperoleh status kewarganegaraan dikarenakan mereka memutuskan menetap di Sabah setelah kontrak kerja selama tiga tahun selesai.

Saat ini Sabah tetap menjadi salah satu tujuan utama TKI. Sekalipun pemerintah Indonesia dan Malaysia semakin tegas dalam penegakan peraturan di daerah perbatasan, masih banyak TKI yang memanfaatkan jasa calo untuk bisa bekerja di Sabah. Padahal pemerintah Indonesia telah menunjuk Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) sebagai agen resmi penyalur TKI ke luar negeri.¹¹ PJTKI adalah institusi swasta yang diberi wewenang oleh pemerintah Indonesia untuk merekrut dan memproses pengiriman TKI ke luar negeri. Bagi pemerintah Indonesia, arus TKI ke luar negeri adalah salah satu cara untuk mengatasi masalah pengangguran dan memberikan kontribusi bagi pemasukan devisa negara. Diperkirakan setiap tahun pemasukan devisa sebesar \$6-7 miliar dibawa masuk ke dalam negeri oleh para TKI.¹²

Terdapat tiga macam pola perpindahan TKI ke Malaysia. *Pertama*, TKI dipaksa untuk bekerja di sektor perkebunan, pembangunan jalan dan kontruksi bangunan lainnya. *Kedua*, kuli kontrak, yaitu TKI dikontrak untuk bekerja pada periode waktu

tertentu dengan sanksi yang berat apabila pekerja itu memutuskan hubungan kerja. *Ketiga*, TKI spontan, yaitu TKI yang bekerja di suatu perkebunan atau kontruksi bangunan atas inisiatif sendiri.¹³ Para TKI ini datang ke Malaysia karena berbagai faktor, yang bisa dikategorikan sebagai faktor penarik dan faktor pendorong. Faktor penarik di sini adalah keadaan geografis dan kesamaan budaya. Secara geografis Malaysia merupakan salah satu negara tetangga terdekat Indonesia. Hal ini akan berkaitan dengan memadainya sarana transportasi yang tersedia baik melalui laut maupun melalui udara. Selain itu, cuaca yang ada di Malaysia relatif sama dengan Indonesia, hanya terdapat dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Akan halnya budaya, budaya kedua negara tidak memiliki banyak perbedaan. Secara khusus, kemiripan bahasa menjadi daya tarik bagi TKI untuk beradaptasi dengan mudah dengan lingkungan baru. Sementara itu, faktor pendorong biasanya berasal dari TKI sendiri, utamanya berupa tuntutan perekonomian untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Selain itu, terdapat juga keinginan TKI untuk mengikuti keluarga yang telah bekerja dan hidup di Malaysia. Pengiriman TKI ke Malaysia, dan negara-negara tujuan pekerja Indonesia lainnya, dapat dipahami dalam setidaknya empat hal. *Pertama*, potensi peningkatan kesejahteraan. Para TKI yang sukses bekerja di luar negeri bisa membangun rumah untuk keluarga di kampung mereka. *Kedua*, peningkatan devisa negara. Peningkatan devisa negara dengan pengiriman TKI ke luar negeri dapat memperbaiki keadaan perekonomian

⁹ Tirtusudarmo, p. 123.

¹⁰ U. Tomiyuki, *Migration and Ethnic Categorization at International Frontier: A Case of Sabah, East Malaysia*, Japan Center for Area Studies National Museum of Ethnology, Osaka, 2000, p. 33.

¹¹ M. Darwin, dkk, *Bagai Telur di Ujung Tanduk, Mobilitas Lintas Batas dan Eksploitasi Seksual di Kawasan Asia Tenggara dan Sekitarnya*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2005, p. 280.

¹² D. Mawuntyas, 'Empat Bulan Devisa TKI Tembus 1,5 Miliar Dolar,' *Tempo*, 19 Juli 2012, <<http://www.tempo.co/read/news/2012/07/19/087417994/Empat-Bulan-Devisa-TKI-Tembus-15-Miliar-Dolar>>, diakses pada 20 November 2012.

¹³ I.B. Mantra, *Mobilitas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia*, risalah seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Kependudukan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 26 Januari 1995.

Indonesia. Namun, peningkatan devisa negara yang dimaksud bergantung pada besarnya jumlah TKI yang berada di luar negeri, tingkat pendapatan mereka di sana, dan bagaimana mereka mengatur pendapatan tersebut. *Ketiga*, peningkatan keahlian kerja dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi yang banyak mengandalkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan bekerja di luar negeri, terutama di negara-negara yang secara ekonomi sudah lebih maju, keterampilan bekerja para TKI diharapkan akan meningkat mengingat pekerjaan yang mereka lakukan di luar negeri pada umumnya sudah menggunakan perangkat teknologi yang maju. *Keempat*, mengurangi pengangguran dalam negeri, di mana keberangkatan TKI ke luar negeri bisa mengurangi beban konsumsi masyarakat tanpa mengurangi produksi.

Seiring dengan banyaknya daya tarik Malaysia sebagai tujuan TKI, tidak sedikit pula masalah yang ditimbulkan dari keberadaan TKI itu sendiri. Misalnya, meningkatnya keberadaan TKI ilegal yang nantinya berdampak pada status kewarganegaraan dari anak-anak para TKI tersebut. Dengan tidak memiliki dokumen resmi keimigrasian, anak-anak TKI akan mengalami kesulitan untuk bersekolah baik di sekolah Malaysia maupun di sekolah Indonesia. Kemudian, juga terjadi banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia pada TKI yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, seperti gaji tidak pernah dibayarkan, kekerasan fisik, serta pelecehan seksual dan penyiksaan atas TKI ilegal yang tidak jelas perlingkungannya. Melihat semakin kompleksnya permasalahan TKI, maka Indonesia dan Malaysia melalui lembaga pemerintah dan non-pemerintah berkerja sama untuk menyelesaikan masalah TKI di Malaysia, khususnya di Sabah.

Permasalahan TKI di Sabah

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dapat digolongkan menjadi TKI legal dan TKI ilegal. TKI legal adalah tenaga kerja yang bekerja di luar negeri melalui prosedur lembaga Antar Kerja Antar Negara (AKAN) dan secara resmi terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Para TKI legal ini mendapatkan jaminan kerja yang luas, termasuk soal kontrak kerja dan hukum yang berlaku di negara tujuan bekerja. Sementara itu, TKI ilegal tidak terdaftar secara resmi di Kemenakertrans. TKI ilegal dapat dibedakan menjadi lima jenis, yaitu: (1) TKI yang pergi ke negara tujuan bekerja tanpa dilengkapi dokumen negara; (2) TKI yang pergi ke negara tujuan bekerja dengan membawa dokumen negara, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen kontrak kerja; (3) TKI yang memiliki dokumen negara dan kontrak kerja, tetapi telah keluar dari majikan yang ditunjuk penyalur TKI dan bekerja pada majikan atau perusahaan lain tanpa memiliki kontrak kerja; (4) TKI yang masa berlaku dokumen negara dan kontrak kerjanya habis, tetapi masih bekerja di negara tujuan bekerja; dan (5) TKI yang memiliki dokumen kerja dan kontrak kerja, tetapi bukan untuk bekerja.¹⁴

Dengan melihat kategorisasi TKI ilegal tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk bekerja di luar negeri para TKI diharuskan mempunyai dokumen negara dan kontrak kerja. Permasalahan dari TKI biasanya berhubungan dengan status TKI itu sendiri, seperti kurangnya pengetahuan dalam pengurusan dokumen imigrasi dan kontrak kerja. Selain itu, para TKI tidak mengetahui batas izin kerja dan prosedur perpanjangan kontrak kerja. Ketergantungan TKI kepada majikan juga menjadi permasalahan tersendiri mengingat pada awal bekerja para TKI menyerahkan paspor mereka kepada majikan sebagai jaminan kerja. Sebagai ganti paspor, para

¹⁴ R. Togaro, E. Sofia, *Perdagangan Buruh Migran Indonesia*, Yayasan Kostala, Mataram, 1999, p. 101.

TKI ini diberi duplikasi paspor sebagai identitas selama berada di negara tempat mereka bekerja.

Permasalahan lain dari keberadaan TKI ilegal, khususnya di Sabah, adalah semakin bertambahnya jumlah TKI ilegal yang berasal dari Indonesia bagian timur yang umumnya bekerja di daerah perkebunan. TKI yang berada di Sabah umumnya berasal dari Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan juga Jawa yang bekerja di beragam tempat, mulai dari pabrik kayu, pabrik pengolahan kelapa sawit, hingga menjadi pembantu rumah tangga. Kebanyakan dari mereka sudah bekerja hingga puluhan tahun dan sebagian besar di antaranya tidak mengenal Indonesia sebagai negara asal mereka. Keberadaan TKI ilegal memberikan keuntungan kepada perusahaan perkebunan dalam pemberian gaji. Beberapa kasus yang sering terjadi biasanya menyangkut pemberian gaji yang kecil, bahkan tidak dibayarkan oleh perusahaan sehingga TKI Indonesia yang berada di Sabah jauh dari kesejahteraan. Keadaan tersebut tentunya berdampak buruk terhadap perkembangan anak-anak TKI, termasuk dalam bidang pendidikan. Untuk bisa bersekolah, umumnya setiap anak harus mempunyai dokumen-dokumen negara seperti akte kelahiran, kartu identitas orang tua, paspor, dan lain-lain. Dengan status orang tua sebagai TKI ilegal yang dokumen keimigrasiannya tidak lengkap, secara otomatis anak-anak dari TKI ilegal dapat dikatakan sebagai tidak mempunyai kewarganegaraan. Hal ini mempersulit anak-anak TKI tersebut dalam proses pendaftaran sekolah di Sabah. Dalam banyak kasus, situasi ini membuat anak-anak TKI ilegal lebih sering membantu pekerjaan orang tua mereka sebagai buruh di perkebunan daripada bersekolah.

Berdasarkan hasil pemutihan Badan nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) jumlah keseluruhan anak TKI yang berusia sekolah

di Sabah, baik legal maupun ilegal, saat ini tercatat lebih kurang 53.000 anak. Sedangkan menurut data dari Bagian Keimigrasian Konsulat Republik Indonesia di Tawau, jumlah anak usia sekolah yang sudah bersekolah di wilayah kerja Konsulat mencapai 21.627 anak. Jumlah ini tersebar di beberapa bagian wilayah di Sabah, seperti Tawau, Kunak, Lahad Datu, dan Semporna. Berdasarkan data tersebut sebagian besar anak-anak TKI tersebut berada jauh dari pusat pendidikan, sehingga kebanyakan di antara mereka lebih memilih untuk bekerja membantu orang tua.¹⁵ Selain itu, kebanyakan TKI tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Ini menjadi persoalan utama dalam melaksanakan beberapa program pemerintah yang telah dirancang dalam pelayanan pendidikan bagi anak TKI.

Dalam pelayanan pendidikan untuk anak TKI, beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Malaysia maupun Indonesia telah mulai memberikan pendidikan non-formal kepada anak-anak TKI yang berada di perkebunan kelapa sawit. Sayangnya, pendidikan yang diberikan LSM tersebut hanya sebatas membaca, menulis, berhitung dan pendidikan keterampilan. Ini menjadi kendala bagi anak-anak TKI yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi karena mereka tidak mendapatkan sertifikat belajar dan surat tanda lulus sekolah dari pemerintah Indonesia ataupun Malaysia.

Melihat permasalahan yang muncul dari keberadaan TKI baik secara legal maupun ilegal, penting bagi Indonesia untuk meningkatkan perlindungan atas hak-hak para TKI tersebut, khususnya perlindungan hukum dan pelayanan imigrasi. Pemerintah juga perlu berusaha menyelesaikan masalah TKI, termasuk soal pelayanan pendidikan bagi anak-anak TKI yang berada di Sabah. Pelayanan pendidikan untuk warganegara tentunya

¹⁵ Wawancara dengan Adib Ahmad Budiman, guru tidak tetap di Humana Learning Centre (HLC)

Ladang Marotai, Perkebunan Sime Darby, Sabah, 13 November 2012.

harus mengikuti aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di sebuah negara. Beberapa peraturan baik nasional maupun internasional yang menjadi landasan pemerintah Indonesia dalam pelayanan pendidikan anak-anak TKI di Sabah akan dijelaskan lebih lanjut pada subbab berikutnya.

Keterlibatan Lembaga Non-Pemerintah Dalam Pendidikan Anak TKI di Sabah

Pelaksanaan pendidikan bagi anak-anak TKI yang berada di perkebunan dilakukan secara legal berdasarkan surat izin pendirian Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) dari pihak perkebunan dan pemerintah Malaysia. PKBM yang berada di perkebunan merupakan hasil kerja sama antara Konsulat Jendral Republik Indonesia di Sabah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dengan Kementerian Pendidikan Malaysia dan perusahaan perkebunan di mana TKI bekerja. Untuk melayani pendidikan di titik-titik layanan yang menjadi target sasaran pendirian PKBM untuk anak-anak TKI dimulai dengan koordinasi oleh berbagai pihak terkait, baik untuk penentuan lokasi layanan, bangunan tempat pembelajarannya, perizinan, guru/tutor yang mengajar, dan lain-lain, serta identifikasi peserta didik.

Saat ini, ada tiga lembaga non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak TKI. Ketiga LSM tersebut adalah *Humana Child Aid Society*, Yayasan Peduli Pendidikan Anak Indonesia, dan Yayasan Pendidikan Mutiara Serat Bangsa.

Humana Child Aid Society

Humana Child Aid Society merupakan LSM di Malaysia yang secara khusus

memberikan pelayanan pendidikan bagi anak-anak TKI yang berada di perkebunan kelapa sawit dengan mendapatkan izin operasi dari pemerintah Malaysia dan pihak perkebunan. LSM ini berada di bawah koordinasi *Borneo Child Aid Society* yang didirikan pada tahun 1991 dengan sponsor salah satu LSM Eropa dan selanjutnya dikelola oleh Humana Holland sampai tahun 1998. LSM ini akhirnya diambil alih oleh perusahaan Malaysia Hap Seng Consolidate's melalui Yayasan Luak Gek Poh.¹⁶

Saat ini di Sabah terdapat 135 Humana Learning Centre yang memberikan pengajaran kepada 11.782 anak didik berkebangsaan Indonesia, 9.607 anak didik Filipina, dan 98 anak didik Malaysia serta 401 anak didik yang berstatus tanpa kewarganegaraan.¹⁷ Walaupun terdaftar sebagai lembaga non-formal, namun Humana menyelenggarakan pendidikan secara formal dengan mengacu pada kurikulum pendidikan Malaysia. Mata pelajaran yang diajarkan di lembaga ini adalah membaca, berhitung, bahasa Inggris, bahasa melayu, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan pelajaran tambahan seperti kesenian dan olah raga. Saat ini dengan terdapatnya guru-guru yang dikirim oleh pemerintah Indonesia melalui Kemendikbud, mata pelajaran Indonesia sudah semakin luas diajarkan kepada anak-anak pekerja TKI di perkebunan, termasuk di Humana. Mata pelajaran yang ditambahkan adalah pendidikan kewarganegaraan dan sejarah Indonesia.

Dalam penyelenggaraan pendidikan Humana memperoleh dana pendidikan dari perusahaan tempat TKI bekerja di samping sumbangan dari UNICEF dan Uni Eropa serta pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidik yang disediakan Humana merupakan guru honorer yang berasal dari Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Tingkat pendidikan guru-guru tersebut sederajat

¹⁶ Borneo Child Aid Society, *Education for Plantation Children*, Lahad Datu, 2009.

¹⁷ Laporan Jumlah Murid Humana Child Aid Society No. HCASS/LB/019/14(013), Sabah, 25 Oktober 2012.

dengan lulusan Sekolah Menengah Atas. Guru honorer ini juga tidak memperoleh pendidikan pedagogik¹⁸ sehingga kegiatan belajar-mengajar menjadi kurang optimal. Namun di lain sisi, terdapat kelebihan yang dimiliki guru-guru Humana, yaitu bahwa mereka mempunyai pengalaman mengajar rata-rata lima tahun, yang tentu lebih memudahkan komunikasi dengan anak-anak TKI. Anak-anak TKI yang belajar di pusat bimbingan belajar Humana, sayangnya, tidak mendapatkan sertifikat atau tanda kelulusan yang bisa digunakan untuk melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Mereka harus mengikuti program kesetaraan Paket A, B, dan C yang disediakan oleh pemerintah Indonesia untuk mendapatkan surat tanda kelulusan yang disahkan pemerintah Indonesia guna melanjutkan pendidikan.

Yayasan Peduli Pendidikan Anak Indonesia (YPPAI)

Yayasan Peduli Pendidikan Anak Indonesia (YPPAI) adalah sebuah LSM yang bergerak di bidang pendidikan sebagai wujud keprihatinan terhadap berbagai persoalan dan masa depan anak-anak warga Indonesia yang tinggal di daerah perkebunan di wilayah Sabah. Yayasan ini berada di Lahad Datu di lingkungan perkebunan Felde yang berdiri pada tahun 2008.¹⁹ Untuk diketahui, Lahad Datu merupakan salah satu wilayah di Sabah yang memiliki banyak perkebunan sehingga, banyak pula TKI yang bekerja di perkebunan-perkebunan di sana.

Dalam menjalankan kegiatan pendidikan, YPPAI memperoleh dana pendidikan yang berasal dari pihak perkebunan dan pemerintah Indonesia melalui Kemendikbud. Bantuan dari pihak perkebunan biasanya berupa gedung tempat belajar serta fasilitas seperti kursi, meja,

lemari dan lain-lain, termasuk perumahan guru serta transportasi untuk anak-anak dari ladang ke tempat belajar. Sedangkan tenaga pengajar yang disediakan merupakan guru yang berasal dari Malaysia dan hanya sedikit yang berasal dari Indonesia. Mata pelajaran yang diajarkan di pusat belajar ini sama seperti yang diajarkan di Humana, plus pelajaran tambahan seperti kesenian dan olah raga serta pendidikan kewarganegaraan dan sejarah Indonesia.

Saat ini YPPAI memiliki delapan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) yang diberi nama Al Firdaus, yang tersebar di perkebunan sawit milik Felde Plantation, dengan jumlah murid sekitar 2000 anak-anak TKI yang berusia antara 6 sampai 16 tahun. Dari jumlah tersebut, 1600 anak menjalani pendidikan dasar dan sisanya bersekolah di tingkat sekolah menengah pertama. Dengan perkembangan pelayanan pendidikan kepada anak-anak TKI yang semakin baik dari tahun ke tahun, pada tahun 2011 YPPAI memperoleh surat akreditasi atau pengesahan dari pemerintah Malaysia. Dengan pengesahan tersebut, optimalisasi pendidikan anak-anak TKI, khususnya di Sabah, menjadi lebih kuat.²⁰

Yayasan Pemberdaya Mutiara Serat Bangsa

Yayasan Pemberdaya Mutiara Serat Bangsa (YPMSB), biasa disebut Serat Bangsa, membuat program kelas jauh di wilayah Sabah yang diberi nama Learning Centre Mutiara Borneo. Terdapat dua program kelas jauh: Learning Centre Mutiara Borneo 1 yang berlokasi di kilang Sanbuni Sawmill di wilayah Kalabakan dan Learning Centre Mutiara Borneo 2 yang berlokasi di Ladang Sawit Tun Fuad/Tun Razak di wilayah Kunak. Pembukaan kelas

¹⁸ Pedagogik adalah ilmu tentang pendidikan anak yang ruang lingkupnya terbatas pada interaksi edukatif antara pendidik dengan siswa.

¹⁹ Yayasan Peduli Pendidikan Anak Indonesia, *Profil Yayasan Peduli Pendidikan Anak Indonesia*, <<http://yppai.wordpress.com/author/yppai/>>, diakses tanggal 8 Januari 2013.

²⁰ Wawancara dengan Firdaus Gigo Atawuwur di PKBM Al Firdaus, Sabah, 14 November 2012.

jauh ini bertujuan agar TKI dan anak-anak TKI yang ingin belajar dapat memperoleh pelayanan pendidikan. Saat ini Serat Bangsa menampung 600 anak dan diperkirakan akan bertambah setiap tahunnya.²¹ Dalam membangun program kelas jauh Serat Bangsa bekerja sama dengan berbagai pihak yang sangat berperan terhadap proses pelayanan pendidikan. Lembaga yang terkait umumnya meliputi pihak perkebunan, Kementerian Pendidikan Malaysia, serta KRI Tawau dan KJRI Kota Kinabalu. Setiap tiga bulan sekali Serat Bangsa memberikan laporan baik lisan maupun tulisan kepada KRI Tawau.

Untuk manajemen pengendalian unit-unit layanan yang tersebar baik di Kabupaten Nunukan maupun di Sabah, Serat Bangsa menggunakan sistem informasi manajemen berupa peralatan elektronik seperti telepon genggam dan media Internet. Sistem ini digunakan untuk komunikasi langsung antara unit-unit layanan pendidikan. Selain itu, Serat Bangsa juga melakukan kunjungan terjadwal untuk monitoring dan evaluasi setiap tiga sampai empat bulan sekali. Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui alur informasi kegiatan layanan pendidikan kesetaraan yang berpusat di Kota Bekasi, Jawa Barat, hingga unit-unit penyelenggaraan pendidikan di wilayah terpencil.

Keterlibatan lembaga-lembaga non-pemerintah memberi kemudahan bagi pemerintah Indonesia untuk memberikan fasilitas pendidikan kepada anak-anak TKI yang berada jauh dari pusat kota, khususnya di daerah perkebunan. Dengan keberadaan pusat belajar ini, anak-anak TKI semakin mudah mengikuti ujian kesetaraan yang diadakan pemerintah Indonesia. Kerja sama lembaga-lembaga non-pemerintah dengan pihak perusahaan perkebunan tempat TKI bekerja ikut membantu mewujudkan pelayanan pendidikan untuk semua seperti yang telah dicanangkan oleh PBB.

Peran NGO Dalam Mengatasi Masalah Pendidikan Anak TKI di Sabah

Permasalahan pendidikan anak-anak TKI di Sabah, menarik perhatian dari beberapa lembaga non pemerintah baik nasional maupun internasional. Sebagai lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga ini mempunyai pengaruh besar dalam pelayanan pendidikan untuk anak-anak TKI yang berada di pelosok perkebunan. Untuk melayani pendidikan di titik-titik layanan yang menjadi target sasaran pendirian pusat belajar untuk anak-anak TKI dimulai dengan koordinasi oleh berbagai pihak terkait, baik untuk penentuan lokasi layanan, bangunan tempat pembelajarannya, perizinan, guru/tutor yang mengajar, dan lain-lain, serta identifikasi peserta didik. Dalam prosesnya, beberapa peran LSM ini mempunyai peran penting dalam akses pelayanan pendidikan bagi anak-anak TKI di Sabah. Beberapa peran tersebut diantaranya:

Menjalin hubungan baik dengan pihak perkebunan untuk menyediakan fasilitas belajar

Melalui pemerintah Malaysia, proses kerja sama dengan beberapa lembaga dan perusahaan perkebunan menghasilkan suatu kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Dengan adanya hubungan erat antara lembaga nonpemerintah dan pihak perusahaan perkebunan, misalnya, maka segala fasilitas baik lokasi maupun bangunan sekolah akan disediakan oleh pihak perkebunan. Dengan mendirikan pusat belajar di daerah perkebunan maka akan memudahkan anak-anak TKI untuk menuju pusat belajar.

Menyediakan Tenaga Pengajar

Tenaga pengajar yang di sediakan oleh lembaga ini hanya sebatas mengajarkan membaca, menulis dan

²¹ Yayasan Pemberdaya Serat Bangsa, *Pangkalan Belajar TKI Perbatasan*,

<<http://ypmseratbangsa.blogspot.com/>>, diakses tanggal 20 Desember 2012.

berhitung. Rata-rata pendidik yang pusat belajar ini merupakan guru honorer yang berasal dari Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Tingkat pendidikan guru-guru tersebut sederajat dengan lulusan Sekolah Menengah Atas, yang tidak mengerti dengan pedagogik. Selain itu, beberapa kurikulum yang diajarkan masih menggunakan kurikulum Malaysia. Namun di lain sisi, terdapat kelebihan yang dimiliki guru-guru Humana, yaitu bahwa mereka mempunyai pengalaman mengajar rata-rata lima tahun, yang tentu lebih memudahkan komunikasi dengan anak-anak TKI.

Menghimpun dana pendidikan dari organisasi internasional

Dalam penyelenggaraan pendidikan, NGO memperoleh dana pendidikan dari perusahaan tempat TKI bekerja. Selain itu, lembaga ini juga mendapat bantuan pendidikan dari organisasi-organisasi Internasional dan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan adanya peran LSM, pelayanan pendidikan untuk anak TKI di Sabah menjadi optimal. Dengan kerja sama antara semua pihak yang bersangkutan maka, tujuan dari kerja sama pendidikan untuk anak TKI di Sabah yang telah disepakati pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia dapat terwujud.

Kesimpulan

Berbagai faktor yang mendorong tingginya minat para TKI untuk bekerja di Malaysia ternyata membawa pengaruh negatif terhadap perkembangan pendidikan anak mereka. Sabah merupakan daerah tujuan utama para TKI, khususnya yang berasal dari Indonesia bagian timur untuk mencari penghidupan. Berdasarkan data Konsulat Republik Indonesia di Tawau, sekitar 21.627 anak TKI di Sabah belum

memperoleh fasilitas pendidikan; hanya sekitar 8.000 anak yang dapat menikmati pendidikan secara nonformal.²² Jumlah ini belum termasuk anak dari TKI ilegal. Minimnya sarana pendidikan serta tuntutan perekonomian memaksa anak-anak TKI untuk bekerja membantu orang tua demi memenuhi kebutuhan keluarga.

Untuk mengatasi hal tersebut, sebenarnya ada peluang bagi anak-anak TKI untuk bersekolah di sekolah Malaysia. Pada prinsipnya, pemerintah Malaysia dapat menerima pelajar asing yang akan belajar di sekolah-sekolah Malaysia, baik sekolah kebangsaan (sekolah negeri) maupun sekolah swasta, sepanjang calon siswa dapat memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan. Beberapa persoalan yang kadang-kadang sulit dipenuhi oleh pelajar warga negara Indonesia untuk mendapatkan pelayanan pendidikan antara lain dokumen pribadi anak, status keimigrasian orang tua, tempat tinggal dan ketersediaan tempat. Sebelum tahun 2002, misalnya, para TKI masih bebas bekerja dan menyekolahkan anak mereka di sekolah Malaysia tanpa dokumen. Tetapi, setelah pemerintah Malaysia mengeluarkan Akta Perburuhan Tahun 2001 dan Akta Pendidikan Tahun 2001, kegiatan mereka dibatasi. Semua pekerja dan pelajar asing harus memiliki dokumen lengkap.²³

Pada umumnya, anak-anak warganegara Indonesia yang tinggal di ladang-ladang perkebunan kelapa sawit, perkebunan teh, dan pabrik-pabrik tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah seperti paspor, visa masuk, dan ijin tinggal. Status keimigrasian orang tua mereka kebanyakan *unskilled workers*. Tempat tinggal mereka berubah-ubah dan tidak mempunyai alamat yang tetap. Di samping itu, tempat tinggal mereka berjarak jauh dari sekolah. Jarak tempuh dari tempat tinggal

²² Data mencakup wilayah kerja Konsulat Republik Indonesia Tawau, 13 November 2012.

²³ D. Bachtiar, *Mengurangi Kebuntuan Penanganan PRT Migran Indonesia di Malaysia*,

Dialog Inter-stakeholders Kerja sama Migrant CARE and ILO, 17 Desember 2009, p. 3.

ke sekolah umumnya memerlukan waktu dua atau tiga jam. Transportasi umum sangat jarang, dan sekalipun ada mereka tidak mampu membayar biaya transpor. Ketersediaan sekolah juga menjadi persoalan bagi pelajar warga negara Indonesia. Selain itu, sikap para orang tua yang kurang menyadari arti penting dan manfaat pendidikan bagi anak-anaknya juga sering menjadi kendala. Permasalahan pendidikan anak-anak TKI di Sabah, menarik perhatian dari beberapa lembaga non pemerintah baik nasional maupun internasional. Sebagai lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga ini mempunyai pengaruh besar dalam pelayanan pendidikan untuk anak-anak TKI yang berada di pelosok perkebunan. Untuk melayani pendidikan di titik-titik layanan yang menjadi target sasaran pendirian pusat belajar untuk anak-anak TKI dimulai dengan koordinasi oleh berbagai pihak terkait, baik untuk penentuan lokasi layanan, bangunan tempat pembelajarannya, perizinan, guru/tutor yang mengajar, dan lain-lain, serta identifikasi peserta didik.

Pelaksanaan pendidikan bagi anak-anak TKI yang berada di perkebunan dilakukan secara legal berdasarkan surat izin pendirian Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) dari pihak perkebunan dan pemerintah Malaysia. PKBM yang berada di perkebunan merupakan hasil kerja sama antara Konsulat Jendral Republik Indonesia di Sabah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dengan Kementerian Pendidikan Malaysia dan perusahaan perkebunan di mana TKI bekerja. Untuk melayani pendidikan di titik-titik layanan yang menjadi target sasaran pendirian PKBM untuk anak-anak TKI dimulai dengan koordinasi oleh berbagai pihak terkait, baik untuk penentuan lokasi layanan, bangunan tempat pembelajarannya, perizinan, guru/tutor yang mengajar, dan lain-lain, serta identifikasi peserta didik.

Saat ini, ada tiga lembaga non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bekerja sama

dengan pemerintah Indonesia dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak TKI. Ketiga LSM tersebut adalah Humana Child Aid Society, Yayasan Peduli Pendidikan Anak Indonesia, dan Yayasan Pendidikan Mutiara Serat Bangsa. Dalam prosesnya, beberapa peran LSM ini mempunyai peran penting dalam akses pelayanan pendidikan bagi anak-anak TKI di Sabah. Beberapa peran tersebut diantaranya:

1. Menjalin hubungan baik dengan pihak perkebunan untuk menyediakan fasilitas belajar

Melalui pemerintah Malaysia, proses kerja sama dengan beberapa lembaga dan perusahaan perkebunan menghasilkan suatu kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Dengan adanya hubungan erat antara lembaga nonpemerintah dan pihak perusahaan perkebunan, misalnya, maka segala fasilitas baik lokasi maupun bangunan sekolah akan disediakan oleh pihak perkebunan. Dengan mendirikan pusat belajar di daerah perkebunan maka akan memudahkan anak-anak TKI untuk menuju pusat belajar.

2. Menyediakan Tenaga Pengajar

Tenaga pengajar yang di sediakan oleh lembaga ini hanya sebatas mengajarkan membaca, menulis dan berhitung. Rata-rata pendidik yang pusat belajar ini merupakan guru honorer yang berasal dari Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Tingkat pendidikan guru-guru tersebut sederajat dengan lulusan Sekolah Menengah Atas, yang tidak mengerti dengan pedagogik. Selain itu, beberapa kurikulum yang diajarkan masih menggunakan kurikulum Malaysia. Namun di lain sisi, terdapat kelebihan yang dimiliki guru-guru Humana, yaitu bahwa mereka mempunyai pengalaman mengajar rata-rata lima tahun, yang tentu lebih memudahkan komunikasi dengan anak-anak TKI.

3. Menghimpun dana pendidikan dari organisasi internasional Dalam penyelenggaraan pendidikan,

Dalam hal ini, NGO memperoleh dana pendidikan dari perusahaan tempat TKI bekerja. Selain itu, lembaga ini juga mendapat bantuan pendidikan dari organisasi-organisasi Internasional dan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dengan adanya peran LSM, pelayanan pendidikan untuk anak TKI di Sabah menjadi optimal. Dengan kerja sama antara semua pihak yang bersangkutan maka, tujuan dari kerja sama pendidikan untuk anak TKI di Sabah yang telah disepakati pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia dapat terwujud.

Daftar Pustaka

Buku

- Axelrod, R.M, *The Evolution of Cooperation*, Basic Books, New York, 2006.
- Darwin, M., dkk, *Bagai Telur di Ujung Tanduk, Mobilitas Lintas Batas dan Eksploitasi Seksual di Kawasan Asia Tenggara dan Sekitarnya*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2005.
- Dror, Y., *Public Policy Making Reexamined*, Chandler Publishing, Scranton, 1968.
- Dye, T.R., *Understanding Public Policy*, 3rd edn, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1978.
- Grindle, M.S., *Politics and Policy Implementation in the Third World*, Princeton University Press, New Jersey, 1980.
- Holsti, K.J, *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis*, Jilid II, terjemahan oleh M. Tahrir Azhari, Erlangga, Jakarta, 1988.
- Keohane, R.O, Nye,J.S, *International Organization*, Vol.25, No.3, The MIT Press, Summer, 1971.
- Mas'oed, M., *Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisis dan Teorisasi*, Pusat Antar Universitas Studi Sosial, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989.
- Tirtusudarmo, R., *Mencari Indonesia: Demografi Politik Pasca Soeharto*, LIPI Press dan Yayasan Obor, Jakarta, 2007.
- Togaro, R. & Sofia, E, *Perdagangan Buruh Migran Indonesia*, Yayasan Kostala, Mataram, 1999.
- Tomiyuki, U., *Migration and Ethnic Categorization at International Frontier: A Case of Sabah, East Malaysia*, Japan Center for Area Studies, National Museum of Ethnology, Osaka, 2000.

Risalah Seminar

- Bachtiar, D, *Mengurangi Kebuntuan Penanganan PRT Migran Indonesia di Malaysia*, Dialog Inter-stakeholders Kerja sama Migrant CARE and ILO, 17 Desember 2009.
- Mantra, I.B., *Mobilitas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia*, risalah seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Kependudukan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 26 Januari 1995.

Artikel dan Surat Kabar Daring

- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, *Fungsi dan Tugas BNP2TKI*, <<http://www.bnp2tki.go.id/>>, diakses 8 Januari 2013.
- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, *Perwakilan di Malaysia Sisakan PR 330000 Orang Belum Berdokumen*, <<http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/6597-perwakilan-di-malaysia-sisakan-pr-330000->

orang-belum-berdokumen.html>, diakses 27 Februari 2012.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Sejarah Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan <<http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/mabbim>>, diakses 8 Desember 2012.

Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, *Profil Sekolah Indonesia Kota Kinabalu*, <http://www.sikk.edu.my/?page_id=2>, diakses 20 Agustus 2012.

Yayasan Peduli Pendidikan Anak Indonesia, *Profil Yayasan Peduli Pendidikan Anak Indonesia*, <<http://yppai.wordpress.com/author/yppai/>>, diakses 8 Januari 2013.

Yayasan Pemberdaya Serat Bangsa, *Pangkalan Belajar TKI Perbatasan*, <<http://ypmseratbangsa.blogspot.com/>>, diakses 20 Desember 2012.

Tesis

Ardarini, M, *Efektifitas Implementasi MoU Indonesia-Malaysia dan Tim Advokasi Tentang TKI di Indonesia*, tesis tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2005.

Lain-Lain

Borneo Child Aid Society, *Education for Plantation Children*, Lahad Datu, 2009.

Data Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kota Kinabalu, 13 November 2012.

Laporan Jumlah Murid Humana Child Aid Society No. HCASS/LB/019/14(013), Sabah, 25 Oktober 2012.